



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : Ke-6
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023
Waktu : Pukul 10.17 WIB s.d. 11.43 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
2. Membahas Program/Kegiatan TA 2024; dan
3. Lain-lain.
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
12 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
2 dari 12 orang Anggota
1. Harvey B. Malaihollo
2. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
2 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
1 dari 7 orang Anggota
1. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
1. Drs. H. Tamanuri, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. An'im Falachudin Mahrus
 3. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Willem Wandik
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
0 dari 5 orang Anggota
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 2. Athari Ghauthi Ardi
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
0 dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN:

1. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI (Dr. Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, beserta
Seluruh jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan informasi dari sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 12 orang dari 56 orang Anggota dan terdiri dari separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena

itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya atau kami membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.17 WIB)

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini dalam rangka membahas evaluasi pembahasan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan program kegiatan Tahun Anggaran 2024, serta isu-isu lainnya.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Adapun hal yang menjadi catatan kami terkait evaluasi Tahun Anggaran 2023 tentang APBN bahwa, realisasi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Oktober 2023 adalah sebesar 67,17%. Capaian ini lebih tinggi 0,21% dari tahun 2022 yaitu 66,96%. Oleh karena itu, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar realisasi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan Tahun Anggaran 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan koordinasi dan kinerjanya sehingga realisasi anggaran dapat berjalan maksimal sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Selain itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam rapat kerja ini antara lain:

1. agar meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kementerian atau lembaga dan dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
2. agar meningkatkan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa yang meningkatkan kapasitas tenaga profesional yang pendamping desa demi terwujudnya desa yang berkembang, maju dan mandiri;
3. agar mengambil upaya, upaya konkrit dalam rangka pengelolaan kinerja badan usaha milik desa serta pengembangan wisata desa yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat; dan yang
4. perlu peningkatan dan pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Menteri Desa dan PDT serta Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya, kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kita hormati dan kita banggakan bersama para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,

Pada kesempatan pagi hari ini, pertama saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena harus merubah jadwal yang sudah ditetapkan dari tanggal 22 November menjadi tanggal 28 November sehingga sedikit mengganggu kinerja para Pimpinan dan Anggota Komisi V di dalam mempersiapkan apa yang menjadi jalur kehidupan kita, utamanya para politisi di mana pada hari ini adalah hari pertama pelaksanaan kampanye, gara-gara permohonan kami dan kemudian terjadi penundaan sampai dengan hari ini, dengan terpaksa Bapak-Ibu yang hadir yang semestinya sudah harus kampanye tidak bisa melaksanakan kampanye. Oleh karena itu, saya doakan mudah-mudahan meskipun hari ini tidak kampanye tetapi tetap terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Yang tidak amin pakai *qobul* juga *nggak papa*.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini ada dua agenda dan tentu nanti ada agenda-agenda lain sesuai dengan perkembangan, yaitu dua agenda yang sudah ditetapkan dalam undangan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan yang kedua Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2024.

Para Pimpinan, dan Anggota DPR RI Komisi V yang saya hormati,

Sebagaimana sudah pernah kita laporkan bahwa pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 sebesar Rp3.206.143.222.000,00 dengan rincian Inspektur, Inspektorat Jenderal 48 miliar sekian, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa

dan Pedesaan 240 miliar sekian, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 325 miliar sekian, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 88 miliar sekian, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 248 miliar sekian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 triliun 870 miliar sekian, Sekretariat Jenderal 220 miliar sekian, dan Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 154 miliar sekian.

Sedangkan realisasi sampai dengan 31 Oktober 2023 yang berwujud keuangan untuk Inspektorat Jenderal 32.238.736.839 atau setara 66,86%, sedangkan realisasi dalam bentuk fisik yang artinya sudah kontrak, sudah dijalankan tinggal pembayaran-pembayaran, hari ini pada tanggal 31 Oktober itu sudah masuk pada posisi 77,49%.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan realisasi per 31 Oktober 2023, 148.327.995.593, realisasi keuangan setara 61,63% sedangkan realisasi fisik sampai dengan 31 Oktober setara dengan 77,73%.

Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi realisasi sampai dengan 31 Oktober 2023, 164.125.639.612, setara dengan 50,45% untuk realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik sampai dengan 31 Oktober setara 53,48%.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal realisasi per 31 Oktober 2023, 59.540.370.899, setara 67,01% sedangkan realisasi fisik setara 80,97%.

Berikutnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi sampai dengan 31 Oktober 2023 Rp155.937.503.562,00 setara dengan 62,66% untuk realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik sudah setara 79,60%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi per 31 Oktober 2023, 1.330.913.512.845, setara dengan 71,15% untuk realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik setara 74,60%.

Sekretariat Jenderal realisasi per 31 Oktober Rp168.281.753.264,00 dengan setara, dengan realisasi keuangan setara 73,35% sedangkan realisasi fisik setara 80,22%.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi per 31 Oktober 2023 Rp94.192.778.880,00 setara 61,05% untuk realisasi keuangan, sedangkan untuk realisasi fisik setara 72,71% sehingga total realisasi sampai dengan 31 Oktober 2023 Rp2.153.558.296.494,00 setara dengan 67,17% untuk realisasi keuangan, sedangkan untuk realisasi fisik setara 73,61%. Sedangkan untuk prognosis

sampai dengan akhir tahun 2023 kita proyeksikan akan penyerapan akan sampai pada angka 98,80%, ini karena memang hari ini hampir semua program yang sudah kita diajukan oleh semua pihak termasuk dari Bapak-Ibu sekalian, itu sudah hampir selesai penyalurannya. Misalnya desa wisata per 27 November, seluruh lokasi 140 lokasi sudah penyaluran dana bantuan tahap 1 70% dan 106 lokasi sudah penyaluran bantuan tahap II 30%. Sedangkan untuk BUMDesa itu juga tinggal 405 yang masih dalam proses melengkapi berkas usulan sehingga prognosis kita berani memproyeksikan pada akhir tahun 2023 penyerapan kita akan sampai pada 98,89%.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya, kinerja serapan sampai dengan 31 Oktober 2023 sebagaimana sudah kita laporkan tadi sampai dengan 31 Oktober sebesar 67,17% yang ini tentu masih di bawah sedikit dari rencana penarikan dana dalam DIPA yang rencana kita sudah pada posisi 73,70%. Namun prognosis penyerapan *Insyallah* kita pastikan nanti pada posisi akhir Desember, sampai dengan Desember 98,89%. Sedangkan perbandingan kinerja serapan anggaran sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan rapat hari ini, posisi kita realisasi 2023 67,17% sedangkan 2022 66,96% sehingga lebih tinggi 0,27% dibanding tahun 2022 dan *Insyallah* nanti bulan Desember juga akan lebih tinggi dibanding penyerapan total di tahun 2022.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sedangkan realisasi *output* prioritas tahun 2023 sudah bisa dibaca di masing-masing laporan kami sehingga nanti tidak perlu saya baca di sini, bisa dicermati dan kemudian ketika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan kita siap untuk membahas bersama-sama.

Bapak-Ibu sekalian,

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya, agenda kedua yang ingin kami laporkan pada rapat kerja hari ini yaitu program atau kegiatan Tahun Anggaran 2024 beberapa kegiatan yang akan datang. Pagu alokasi Tahun Anggaran 2024 untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu total Rp2.765.000.969.080,00 sehingga ini agak sudah agak turun dibanding pagu-pagu alokasi Tahun Anggaran 2023, di mana di angka itu ada rupiah murni 2.000.428.414.911, kemudian pinjaman luar negeri sebesar Rp334.554.169,00 dan hibah luar negeri sebesar dua rat maaf *tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan ribu rupiah* sedangkan hibah luar negeri sebesar Rp300 juta, Rp3 miliar.

Demikian yang bisa saya laporkan untuk pagu alokasi Tahun Anggaran 2024, sedangkan rincian untuk pagu 2024 sebagaimana di halaman berikut, pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan transformasi ekonomi Kampung terpadu TEKAD oleh IFAT, ini khusus daerah Indonesia Timur, Papua, Papua,

Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua Barat, ada empat-empat provinsi, tiga wilayah tapi beberapa provinsi karena Papua menjadi banyak.

Kemudian penerimaan bukan pajak, kita proyeksikan ada Rp1.544.000.000,00. Kemudian untuk alokasi Tahun Anggaran per UG-1 ini bisa dilaporkan, pertama Inspektorat Jenderal sebesar Rp39.696.596.000,00. Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp166.992.889.000,00. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp225.612.164.000,00 kemudian Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp76.482.190.000,00. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp194.521.490.000,00. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi *satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh enam ribu rupiah*. Sekretariat Jenderal Rp225.487.993.000,00. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp140.136.382.000,00.

Sedangkan *output* prioritas tahun 2024 bisa dicermati dan didalami Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita laporkan lengkap sebagaimana di lampiran laporan kami.

**Bapak-Ibu,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Demikian yang bisa kami laporkan untuk rapat kerja pada hari ini.

Terima kasih. Mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Menteri.

Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan dan pendalaman Anggota yang terhormat. Yang terdaftar di sini, mohon maaf ini karena memang musim-musim kampanye ini jadi yang apalagi pembukaan ini hari ini, jadi yang hadir ini seperti ini adanya tapi mudah-mudahan terwakili semua.

Yang pertama Pak Tamanuri, silakan Pak Tamanuri.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

**Yang saya banggakan Bapak Ketua, beserta
Beberapa orang Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri, beserta
Seluruh jajarannya,
Hadirin berbahagia,**

Kami bersyukur bahwa ada peningkatan persentase walaupun ini baru sampai bulan 10 dari tahun 2023, 2022. Kemudian juga kami merasa *trenyuh* melihat anggaran 2024 di mana kita 2023 masih bermain tiga koma, tiga koma tiga, *enggak* 2023, kemudian permainan kita 2024 dua koma tujuh. *Nah*, ini penurunan yang signifikan, terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka walaupun Bapak juga mau nyalon, terpaksa ini harus bekerja keras untuk membangun desa-desa yang akan datang.

Kemudian yang perlu tanyakan yaitu masalah dari sekian banyak persentase yang saya lihat, masalah persentase pencapaian Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi Desa dan Investasi Desa yang lain itu sudah di atas 70 semua bahkan ada yang 80, dia masih bermain 53,48. *Nah*, ini saya tidak tahu penyebabnya tapi secara tertulis di sini ini menunjukkan suatu keprihatinan, tapi mudah-mudahan karena kita masih ada waktu 2 bulan lagi bisa mengejar semua yang kita harapkan presentase kita 98,89 bisa kita capai.

Selain daripada itu, saya berterima kasih kepada Pak Menteri di mana di daerah saya Dapil II sudah diberi bantuan apa desa wisata sekian banyak, di bantuan jalan lingkungan sekian banyak, kemudian BUMDes juga sedemikian rupa. Akan tetapi perlu saya sampaikan, itu kita turunkan uang 500-an juta untuk desa wisata tapi kita tidak ada pendamping, Pak, tidak ada dari pihak Bapak yang mendampingi penggunaan uang ini sehingga ada dua, ada dua tempat yang saya memprihatinkan.

Kalau menurut pengamatan saya, *loh kok* hasilnya cuma segini ya, bahkan yang satu tempat di Kecamatan Pekurun namanya itu karena ada pergantian antara kepala desa yang lama dengan yang baru terbengkalai sama sekali. *Nah*, ini patut untuk diangkat, Pak, patut untuk diangkat menjadi satu permasalahan hukum. Karena apa? karena ini kalau Bapak itu turunkan juga pendamping berarti wisata-wisata seperti yang lain-lainnya tentu kita bisa mengetahui sudah sebatas mana prosentasenya yang dikerjakan, jadi uangnya itu yang digunakan batas ini, tapi kalau kita tidak ada pendamping sama sekali semau-maunya orang untuk menghabiskan uang ini. Waduh, ini uang negara. Kalau uang negara itu ya walaupun 1 rupiah harus kita pertanggungjawabkan.

Jadi oleh karena itu, harapan saya adalah yang akan datang bahwa yang besar-besar itu seperti wisata, desa wisata, seperti jalan-jalan desa itu

ada pendampingannya, supaya harapan kita, harapan Bapak tentunya sudah mengucurkan itu bisa dirasakan oleh masyarakat.

Saya rasa demikian, Pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Tamanuri.

Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri yang saya banggakan, dan
Seluruh jajaran Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal,**

Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya terhadap pelaksanaan program tahun 2023. Saya, jujur saya menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir ini, itu membuahkan efek yang positif, tanggapan yang baik dari rakyat di desa.

Nah, oleh karena itu, saya sangat bangga dan patut menyampaikan rasa syukur dengan adanya langkah-langkah kita di dalam membenahi desa, tetapi pekerjaan rumah kita ke depan ini merupakan tantangan yang berat, Pak Menteri. Karena semua perangkat desa sangat mengharapkan ada perubahan, apakah dari sisi anggaran maupun dari sisi pelayanan kepada masyarakat desa. Ini jujur saya katakan bahwa, Pak, desa ini menjadi rebutan dalam tahun politik. Oleh karena itu, kita pintar-pintar menghadapi hal ini, Pak Menteri, agar supaya jangan sampai hal-hal ini tercederai dengan hal-hal yang tidak sepatutnya akibat tahun politik ini.

Saya terima kasih dan memberi penghargaan atas capaian walaupun baru 73% dan ingin saya ketahui apakah sisanya ini lebih banyak belanja barang atau masih belanja modal ya. Kalau belanja barang, saya kira bisa kita kebut apalagi manajemen, biaya manajemen dan saya yakin ini bisa kita selesaikan sesuai prognosis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya yakin dan percaya walaupun ini sisa satu bulan lewat sedikit.

Nah, saya kembali Pak Menteri dalam hal mengembangkan desa. Dalam *statement* Pak Menteri NKR, NKR POS ya saya baca dan saya sependapat dengan itu, tetapi barangkali yang harus kita pikirkan ini adalah undang-undangnya dulu harus direvisi, Pak, makanya beberapa saat yang lalu saya sampaikan keterlibatan langsung dalam revisi Undang-Undang Desa ini dari pihak Kementerian Desa harus konkret. Jangan hanya dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri dan yang lain-lain, tidak memahami desa. Bagaimana desa itu bisa dikembangkan dengan baik, tapi saya juga mengingatkan, Pak Menteri, tolong direm-rem sedikit, Pak Menteri, barangkali teman-teman desa ya untuk tidak memaksakan dulu keadaan dan kondisi ini, ya mudah-mudahan ya kita dalam tahun depan itu ada Presiden baru, siapapun ya kita harus membuat konsep yang besar terhadap pembangunan desa.

Ada satu hal yang menjadi catatan dalam perjalanan saya mengunjungi desa, Pak Menteri. Bukan hanya bagaimana meningkatkan dana desa, tetapi persoalannya hidupnya kepala desa itu sangat tergantung pada gaji yang di *drop* oleh Bupati, di mana setiap daerah sudah mengalokasikan 10% dari dana DAU itu untuk ADD, di mana ADD itu dipakai untuk membayar gaji perangkat desa sampai kepala dusun. Ini yang tidak dilakukan secara optimal, sedih mendengarkan.

Kita lihat dan kita mendengarkan kadangkala kepala desa itu untung kalau terima gaji 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kepada bupatinya. Maka saya dalam pemikiran saya dalam perjalanan, Pak Menteri, saya ingin merubah anggaran ini, apakah yang diserahkan oleh pemerintah daerah berupa ADD itu bagaimana kita langsung saja kepada desa masing-masing, *and toh* itu adalah APBN. Ini yang harus kita perjuangkan di samping dana desa, tapi tolong dipahami dulu bahwa tahun 2024, APBN itu telah menganggarkan 71 triliun untuk dana desa ya. Kalau diminta 5 miliar walaupun itu saya juga tahu penting tapi kalau 5 kali 7 itu sudah 300 sekian juta triliun. Ini secara fundamental kita harus punya konsep yang besar terhadap desa. Tolong teman-teman di Kementerian Desa memikirkan hal ini.

Banyak hal, Pak Menteri, infrastruktur-infrastruktur tidak bisa kepala desa berbuat apa-apa karena masih sangat tergantung pada APBD-nya. Jalanan untung sekarang ada yang namanya Inpres Jalan, itu sudah mulai kita genjot terhadap infrastruktur-infrastruktur desa. Semua tumpuan ini *frontliner* pemerintahan itu ada di desa, *stunting* ada di desa, data semua tumpuannya kepada kepala desa, semuanya desa, tetapi sebagian kewenangan-kewenangan daerah itu masih tersandra oleh bupati.

Saya inginkan, Pak Menteri, ayo kita pikirkan pembangunan desa secara menyeluruh. Saya kembali kepada DAU. DAU itu juga transfer dari pusat. Saya akan bicarakan nanti *Insyallah* kalau perumusan yang akan datang kalau masih Tuhan menghendaki saya duduk di DPR, mari kita sama-sama pikirkan itu. Jangan lagi kepala desa itu sangat tergantung kepada bupatinya tetapi saya mencoba mencari undang-undangnya dulu, ketergantungan kepala desa kepada bupati ini sangat-sangat besar dan bisa dijadikan alat untuk menekan kepala desa.

Ini yang saya pikirkan, Pak Menteri. Mari kita ke depan untuk membuat konsepsi-konsepsi yang baru di dalam membangun desa. Semua kita katakan bahwa desa adalah ujung tombak kita semuanya untuk mensejahterakan rakyat. Ini kira-kira yang ingin saya paparkan pada kesempatan ini dan kemudian untuk tahun depan, Pak Menteri, kita sudah tetapkan anggaran walaupun 2,7 triliun tapi ayo kita maksimalkan untuk membantu desa.

Kawan-kawan di Komisi V termasuk saya, Pak Ketua pasti ,semua kita sudah menjanjikan kepada kepala desa dan kepala desa setiap ada Komisi V tempat curhatnya ada pada kami, Pak, *ndak* bukan kepada bupati kepada kami, cari Komisi V semua *uneg-unegnya* ada.

Nah, oleh karena itu, saya minta dengan sangat semua yang diprogramkan tahun 2024 adalah janji-janji politik kami nanti turun ini untuk direalisasikan pada tahun 2024. Makanya ada berapa usulan saya, mohon menjadi perhatian apakah itu jembatan desa yang pendek anggarannya tidak sampai 300 juta, yang kecil-kecil begitu tolong diperhatikan, tolong itu direalisasikan karena itu adalah janji-janji politik kami.

BUMDes apalagi, kita bangga dengan keberadaan BUMDes, belum pernah ada satu cacian pun terhadap yang namanya BUMDes, tapi kontrol dan pengendalian harus kita tegakkan dan harus kita lakukan dengan baik. Tidak ada yang apa namanya malah barangkali memang Pak Menteri bisa dorong kapan sebenarnya walaupun Komisi V tidak terlibat di dalam revisi undang-undang ini, tapi pikiran dan prospek kami sangat tergantung pada revisi Undang-Undang Desa yang akan datang.

Saya kira itu, Pak Menteri, semua berjalan dengan baik dan saya titipkan barangkali Ibu Profesor tidak ada di sini, gak hadir BPSDM-nya? ada Bu ya, dalam ini sekarang Ibu menerima pendamping ya, tolong diseleksi dengan baik, jangan kita membeda-bedakan. Jujur calon saya ada lima orang, mudah-mudahan bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa dibantu. Kalau, lagi-lagi kalau memenuhi persyaratan dan ketentuan. Jangan sampai kita salah memaksakan Ibu, tetapi saya yakin harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipersiapkan. Jangan menimbulkan ketidakadilan dan sebagainya, lakukan secara profesional dan benar-benar kita seleksi apa yang terbaik di pendamping desa itu.

Saya kira Pak Menteri sudah paham itu, apalagi Ibu Prof. Mudah-mudahan ke depan jangan juga kita malu karena sudah janji mereka.

Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Luar biasa Pak Hamka.

Baik, Pak Harvey ada? Pas. Pak Djenri? Pas, eh ada silakan.

F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH):

Terima kasih atas kesempatan.

**Pak Menteri PDT dan staf,
Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi yang banyak sekali hadir hari ini,**

Ya, karena hari pertama masa kampanye, memang waktunya kurang tepat karena sebenarnya juga Pak Menteri *enggak* boleh hadir di sini karena ini kan masa kampanye, Pak. Pak Menteri kan caleg juga ya.

Saya menyambung apa yang disampaikan oleh rekan tadi. Saya sebenarnya agak mau bilang masa bodoh *gak* juga karena dari dulu saya aneh dengan Kementerian ini karena PDT-nya semua temanya desa tapi dari sisi penganggaran seperti dianaktirikan. Karena katanya ada yang selalu saya katakan kalau mau membangun negara bangun dari desa, apalagi kita kemarin dulu 80% katanya kita masih di desa, tapi anggarannya bukan malah naik tapi turun terus sehingga pada suatu saat yang lalu saya katakan kalau seperti ini ya rintihan para aparat desa itu tidak diperhatikan oleh negara.

Saya pernah menyatakan bubar saja kementerian ini kalau anggarannya seperti itu. Apalagi katanya hanya sebagai kementerian yang fungsi tidak teknis lah ya sehingga anggarannya sedikit, tapi saya katakan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Dana desa apa desa wisata juga ada anggaran yang masuk di situ, aneh, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga mendukung tadi sampai hari ini perangkat desa itu terus menjerit. Memang betul ya, apalagi kalau perangkat desanya tidak sejalan dengan bupati warna politiknya seringkali dipersulit dan itu bukti di... di apa di desa-desa, tidak semua 100% *sih* kecuali kepala desanya yang suka apa satu jalan dengan bupati waktu kampanye ya dia yang dapat fasilitas bagus terus, tapi yang lain jadi alat tekanan supaya dia harus ikut jalan keselamatan dari pak bupati atau kepala daerah itu.

Saya tidak banyak mau bicara, Pak, yang kedu, yang berikut karena ini sementara rekrutmen pendamping desa. Bolehkah suami istri jadi pendamping desa? karena saya temukan ada di daerah saya itu suami istri itu dua-dua pendamping desa. Ya, mungkin saya tidak tau aturan secara teknisnya seperti apa, tapi perlu ada penjelasan.

Yang berikut, benarkah pendamping desa ini ada afiliasi politik ke partai politik tertentu? karena saya sudah dapatkan bukti grupnya mendukung salah satu partai dan calon presiden, saya ada bukti. Kalau Bapak mau perlu saya tunjukkan, malah orang yang tidak sejalan dengan partai atau calon Presiden

itu dikeluarkan dari dari grup itu. Bahkan katanya tahun ini tidak lagi bisa direkrut karena tidak sewarna, tidak sejalan. Itu, itu saya mau minta klarifikasi. Tolong di.. dijelaskan nanti apa itu betul, tapi kalau mau ambil bukti saya bisa kasih bukti untuk itu. Bahkan orangnya saya bisa bawa ke sini ya mungkin karena orangnya bukan warna dari partai atau presiden, calon presiden tertentu. Mungkin hanya hal-hal ini yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Pak Syafiuddin ada? Kemudian Pak Willem Wandik, silakan Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

**Pak Ketua dan rekan-rekan Anggota Komisi V, dan juga
Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, dan juga
Pak Sekjen, serta
Seluruh jajaran yang kami hormati,**

Dari kami ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan penyerapan anggaran terlihat di pemaparan tadi realisasi fisik sebesar 73%, seperti realisasi anggaran ini merupakan realisasi terendah dibandingkan kementerian/lembaga lain.

Oleh karena itu, itu kiranya bisa menjadi perhatian supaya bisa mencapai targetnya yang paling sedikit 96 atau 98% dan juga terkait adanya beberapa singkatan di sini seperti PKB di *slide* 6, realisasi prioritas Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tadi, ini tidak mungkin PKB atau misalnya Partai Kebangkitan Bangsa ya. Iya, karena itu mungkin perlu ada penjelasan dari Pak Menteri.

Dan juga terkait dengan realisasi anggaran dari anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri pada Tahun Anggaran 2023 ini. Kami melihat belum ada informasi realisasi anggaran dari paparan Menteri tadi. Kiranya bisa memberikan penjelasan terkait dengan beberapa, terkait dengan sumber PHLN yang dapat terserap di beberapa Dirjen yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Dan juga terkait dengan pelaksanaan pelatihan masyarakat yang ada di masing-masing balai, apakah selama ini BPSDM sudah melakukan studi evaluasi? apakah pelaksanaannya memberikan dampak bagi peserta pelatihan?

Dan kedua terkait dengan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Kementerian Desa 2024, di sini kami melihat sebesar 2,7 triliun. Kami harap penyerapannya bisa diperhatikan secara baik supaya bisa mencapai target yang sudah ditentukan.

Yang berikut terkait dengan alokasi program Kementerian Desa untuk 2024. Kembali lagi kami mengingatkan untuk... untuk yang bersumber dari pendanaan PHLN-nya kiranya juga menjadi perhatian karena ini juga terkait dengan beban bunga berjalan.

Dan berikut terkait dengan dokumen perencanaan Kementerian Desa untuk anggaran 2024, ini juga perlu menjadi perhatian karena ini kami masuki tahun *urgent* karena menghadapi tahun politik, karena kami sering juga melihat terkendala karena perencanaan, terkendala dan sering juga menghadapi hambatan terkait dengan kurang tersedianya penyiapan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, mestinya pada Tahun Anggaran 2024 ini dialokasikan untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan strategis Kementerian Desa untuk 2019-2024 tentunya bisa menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan Renstra Kementerian Desa 2025-2029 mendatang.

Dan terakhir, oleh karena itu, alokasi anggaran untuk kegiatan program studi RPJMN 2025-2029 dan RPJMN atau 2025-2045 di bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 1,2 miliar di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, ini kiranya bisa menjadi perhatian.

Itu yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Willem.

Adik saya, Tari ada? pas.

Ya, baik. Dari meja Pimpinan sekarang saya sendiri, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Pak Menteri *nih*.

Terdapat beberapa *output* ya yang masih di bawah 50%, saya lihat pekerjaan ini masih banyak 50% pekerjaan Pak Menteri. Ini mungkin menjadi perhatian di tingkat staf Pak Menteri, antara lain itu sarana air bersih baru 29,63% sementara kita tinggal sebulan lagi, Pak, fasilitas umum baru 36%, kemudian fasilitas per apanya persebaran penduduk itu justru 0%, Pak Menteri, dari target 193 KK itu 0% sekarang. Jadi saya minta ini menjadi perhatian Pak Menteri melalui staf-staf yang ada.

Kemudian juga ada *output* prioritas di BPSDM khususnya peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional baru mencapai 54,1%. Oleh karena itu, mungkin Pak Menteri perlu berkoordinasi dengan Komisi V yang terkait

terkait dengan Dapilnya Anggota supaya ini bisa lebih cepat terselesaikan. Ini bukan main ini yang dari 8.750 baru 4.734 yang didata.

Kemudian yang soal jalan desa ini. Ini menjadi perhatian Pak Menteri. Karena jalan desa itu kita sebenarnya pada waktu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu, itu sudah ada masuk di APBN sebenarnya di Kementerian PUPR tetapi Inpresnya tidak sempat keluar, Inpres tidak sempat keluar. Mungkin barangkali karena sudah terlalu banyak dana desa yang masuk. Umpamanya seperti sampaikan Pak Hamka tadi 71 triliun, jadi kalau 5 tahun berarti 355 triliun, itu cukup besar itu.

Sebenarnya desa kita sudah harus sudah maju itu, kalau itu dikelola dengan baik tapi ya banyak hambatan-hambatan yang ada yang perlu perhatian Pak Menteri melalui apa namanya para Dirjennya yang terkait dengan itu. Pengamatan kita di lapangan itu adalah memang banyak bocoran-bocoran yang ada, misalnya mereka kalau mengurus pencairan dana itu mereka konon kabarnya ya saya kita tidak bisa, tidak boleh menunduh, konon kabarnya itu mereka harus ada setoran itu, ada setoran kepada PP apa BPPD ya yang di daerah itu, yang menangani desa itu, itu juga mungkin konsepnya perlu dipelajari ini sehingga.. tapi memang serba salah, mereka juga tidak punya kemampuan apa-apa, para kepala desa ini tidak semua juga mampu untuk menyelesaikan persoalan bagaimana tata cara pelaporan. *Nah*, dibuatkan laporanlah, dipungutlah biaya dan seterusnya dan kalau tidak dikasih biaya ya tidak-tidak cair uangnya, *nah* itu itu contoh-contoh. Belum lagi permainan di lapangan. Masa uang 30, 355 triliun itu desa kita masih seperti ini adanya, kita turun di desa masih biasa-biasa saja walaupun ada perubahan yang kecil-kecilan aja yang kelihatan itu adalah kalau ada jalan desa yang kecil-kecil, kalau di pulau-pulau ada *paving-paving blok* yang ada seperti itu.

Kemudian ketergantungan bupati seperti Pak Hamka tadi ini perlu dicermati betul ini. Saya pengalaman tiga hari yang lalu, Pak Menteri, ini-ini cerita *real* ini. Saya ada turun ke desa, di desa itu kebetulan ikut juga calon bupati di kabupaten itu. Itu kepala desa teman saya, Pak, dia baru terpilih, teman saya dia tidak mau ketemu, saya datangi di rumahnya dia masuk di kamar tidur dia kunci diri, dia tidak mau ketemu, dia takut bupatinya. Ini contoh-contoh konkrit yang sangat tidak sehat sebenarnya.

Jadi ya saya juga tidak bermaksud meminta Pak Menteri untuk segera mengambil langkah-langkah yang kayak apa, tapi bahwa mesti ada konsep ini yang jelas yang seperti disampaikan Pak Hamka tadi, jadi sehingga tidak ada ke apa namanya ketakutan para kepala desa dengan bupati atau BPMD yang di daerah, yang pada akhirnya mereka ada kebebasan tetapi betul-betul kebebasan yang terukur, yang mereka bisa apa namanya memajukan desanya dengan dana-dana desa yang sudah masuk.

Bukan main 10% dari APBD, dana desa juga ada mereka dapat. Kemudian dari sini juga ada kurang lebih 800 sampai 1 miliar untuk dana desa yang mereka dapatkan, itu luar biasa dana desa begitu kecil, tapi perkembangan desa itu masih sangat lemah. Oleh karena itu, perhatian Pak

Menteri barangkali dengan seluruh Dirjennya untuk mengamati apa permasalahannya sehingga bisa terjadi kendala-kendala kemajuan desa yang kita rasakan seperti saat ini.

Barangkali itu ya Pak Menteri yang soal pendamping desa, ya kita *enggak* ada kabar ini kita. Pak Hamka, Pak Hamka *enggak* ada kabar ya, kita *enggak* ada kabar bahwa ini ada penerimaan jadi kita tidak tahu. Padahal ini sangat penting dalam pemilihan seperti ini sangat penting ini, paling tidak sudah (*suara tidak jelas*) dapat 5 orang, 10 orang *gitu* tapi *enggak* apa-apa. Barangkali itu, Pak.

INTERUPSI F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Interupsi, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan-silakan.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Tambah sedikit sekali, tapi ini penting.

Pak Menteri, itu kan desa wisata kita itu kan ke Jakarta nya ngambil uang kan. Jadi ini *ngapain* lagi ngelibatin Kasi di apa dinas PMK itu, Pak, mereka itu *enggak* mau Pak kalau *enggak* ada macam-macamnya, kan kasihan kita sama kepala desa, di orang di orang dua itu Kasi itu yang yang terlibat di dalam desa wisata itu, mereka *enggak* mau jalan kalau *enggak* ada apa-apanya, harus sekian persen. Jadi oleh karena itu, kita kasihan memang uangnya sudah sedikit, dipotong ini dipotong itu kenapa kalau *enggak ngelibatin* mereka, langsung aja kepala desa mengetahuinya, selesailah itu.

Sebabnya di bawah itu apapun bentuknya paraf sedikit pun kalau *enggak* ada yang gambar Pak, Pak, Pak, Pak, Pak Soekarno-Hatta ya *enggak* bisa, Pak. Oleh karena itu, kalau masih bisa dirubah itu aturannya dirubah aja Pak, *enggak* usah *ngelibat*-libatkan Pemda itu.

Makasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, saya tambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Jadi, saya tambahkan Pak Menteri, barangkali sejalan apa yang disampaikan juga Pak Ketua tadi saya. Memang menerobos aturan ini bukan hal yang mudah ya, saya pahami itu maka solusinya adalah bagaimana kita intervensi dari revisi Undang-Undang Desa ini.

Persoalan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi dan juga saya hadapi dan saya dengarkan dan saya lihat langsung bagaimana kesedihan, bagaimana susah kepala desa di dalam berbuat. DAU itu adalah ADD-nya mereka, karena ada dua sumber APBDes-nya desa, tiga sumber. Yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua adalah dana desa, yang ketiga adalah ADD. ADD itu berasal dari bupati yang di SK-kan di peraturan daerah 10% dari dana desa, itu tidak bisa.

Nah, sekarang yang harus kita pikirkan adalah apa yang menyebabkan, aturan apa yang menyebabkan sehingga desa itu sangat tergantung pada ADD, ADD yang dikeluarkan oleh desa. Pikiran saya adalah karena itu adalah DAU, itu adalah transfer daerah juga, dana desa dalam bentuk DAU itu tidak perlu lagi melalui bupati. Ini kan transfer daerah juga, Pak Ketua. ADD yang untuk diperuntukkan untuk kepala desa itu untuk gaji dan biaya operasional mereka, sedangkan dana desa itu sudah *mandatory* ada penggunaannya.

Kehidupannya, pak desa itu adalah dari ADD. ADD itu dana transfer daerah dari Jakarta ke bupati. Kita ingat dulu bahwa dana desa itu masuk ke bupati dulu baru ke kepala desa, itu *problem*. *Alhamdulillah*, langsung. Saran saya, kita mencari rumusan, apakah tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar kalau DAU yang disiapkan dari transfer daerah itu untuk ADD dana desa itu langsung ke rekening desa. Ini juga saya masih mencari di mana letaknya. Karena desa dengan-dengan bupati ini masih ada aturan hukum yang saya mau lihat sebenarnya, di mana letak persoalannya ini sehingga begitu takutnya pak desa kepada bupati karena ADD-nya sangat tergantung kepada bupati, itu loh.

Ini yang sementara saya kaji dan sementara saya lihat apa yang harus kita lakukan dari sisi perundang-undangan keuangan kita. Kasihan kepala desa. Ini... ini Pak Menteri, saya, benar-benar seandainya saya masuk di Baleg untuk menyusun revisi Undang-Undang Desa barangkali saya sudah labrak kiri kanan kalau tidak dimasukkan ini persoalannya.

Saya kira itu saja tambahan, Pak Ketua, karena ini adalah merupakan *problem* kita semua sama di daerah, apalagi pak desa itu apalagi kondisi-kondisi sekarang ini kita tidak tahu kasihan pak desa, digerek ke mana ke kiri kanan kiri kanan dan seterusnya. Saya kira itu saja tambahan memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya juga perkuat sampaikan Pak Hamka ini, saya tambah-tambah sedikit.

Pak Menteri, memang itu perlu pendalaman memang itu, karena saya lihat para kepala desa takut dengan bupati antara lain adalah mereka bisa diperiksa Inspektorat, saya lihat, bisa diperiksa Inspektorat dan bisa dicarikan salahnya. Yang namanya kesalahan kepala desa pasti tidak mungkin tidak ada salahnya, Pak, begitu dapat kesalahan langsung diberhentikan dia dan diganti dengan Plt desanya, belum lagi dimasukkan ke ranah hukum, itu masalah itu.

Jadi mungkin, Pak Menteri, yang disampaikan Pak Hamka tadi memang konsepnya harus dicari bagaimana tingkat pengamanannya, tapi juga harus dicari jalan keluarnya agar dana-dana desa juga jangan-jangan ditilep juga oleh kepala desa *gitu*, sehingga pada akhirnya semuanya memang kompleks persoalannya. Karena kompleks persoalannya, jadi Pak Menteri lah yang paling-paling tepat untuk mencari rumusan-rumusan yang lebih konkret ya sehingga semuanya berjalan baik, pemerintah kabupaten berjalan baik, pemerintah desa berjalan baik, satu kesatuan mereka berjalan dan semuanya berhasil baik buat masyarakat.

Yang terakhir Pak Eddy Santana ada? Pak Eddy Santana ada?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Eddy Santana ada? silakan-silakan, sebentar Pak Willem.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang saya hormati,
Menteri Desa,
Seluruh jajaran yang sama saya hormati,**

Saya melihat ini, Pak, tahun 2023 ini, mohon maaf baru nyampai tadi macetnya parah. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2023, ini jauh sekali ya, Pak ya, mungkin ada teman-teman tadi sudah menyampaikan juga. Kita baru 67,17%, *nah* ini di mana ini. Kemungkinan ya yang paling-paling kecil persentasinya, progresnya adalah belanja barang dan belanja modal.

Nah, ini sekali lagi belanja barang ini apakah tidak ada evaluasi *gitu* ya, ada evaluasi karena gaji pendamping itu masuk di sini *gitu*. Saya..., saya kurang mengerti *gitu* ya, apakah gaji itu dimasukkan ke belanja barang bukan belanja pegawai *gitu*. *Nah*, ini-ini-ini-ini saya juga kurang memahami aturan di Kementerian Desa ini, ini mohon-mohon penjelasan, Pak ya.

Nah, kemudian dari..., dari Dapil Pak, ini banyak sekali permintaan *gitu*, permintaan-permintaan untuk desa wisata. Kelihatannya desa wisata, Pak Menteri ini berhasil kita, beberapa tahun ini ya itu jadi di desa-desa itu yang mempunyai potensi wisata itu jadi primadona juga. Karena sulit APBD mau masuk ke sana *gitu*, apalagi APBN dari yang lain-lain kecuali dari Menteri Desa ini, dari parawisata juga kalau yang kecil-kecil ya tidak dilihat itu, tidak dilirik itu, kecuali yang proyek strategis nasional *gitu*.

Nah, inilah harapan mereka dari Kementerian Desa *gitu*. Saya kira tidak ada salahnya kalau ini-ini diperbanyak *gitu* anggaran untuk desa wisata ini dan dan kami terus terang ada kebanggaan juga *gitu* bisa memperjuangkan desa wisata ini sehingga ya tahun 2024 kan bisa dikenang kita. Saya kira ini ngertilah Bapak itu.

Makasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Makasih, Pak Eddy ya.

Pendek saja Pak ya, Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik, Pak Ketua.

Sekali lagi Pak Menteri, Pak Sekjen, dan juga Pak Dirjen Desa, terkait dengan setelah saya mencermati terkait dengan rekrutmen-rekrutmen desa, saya mau tanya, apakah proses rekrutmen pendamping desa ini Anggota Komisi V ini bisa dapat dilibatkan?

Oleh karena itu, di sini perlu dilihat atau perlu dipikirkan terkait dengan bagaimana mekanismenya, mungkin itu yang perlu dijelaskan dan perlu dipikirkan di sini sehingga apa yang dikeluhkan oleh Ketua maupun rekan-rekan tadi itu bisa di apa bisa diminimalisir.

Demikian singkatnya, Pak Menteri. Terima kasih.

Terima kasih, Pak Ketua, kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Iya makasih, Pak Willem.

Mungkin tambahannya juga adalah walaupun ada misalnya selama itu tidak melanggar ketentuan yang ada untuk per.. per Anggota Komisi V bisa berapa orang itu bisa mengirim ke itu barangkali juga ada ketetapan dari Pak Menteri supaya kalau kita mencari teman-teman yang bisa menjadi pendamping desa yang tentu yang *capable*, yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi barangkali bisa berapa orang ditentukan *gitu*.

Baik.

Pak Menteri, silakan Pak Menteri tanggapannya.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Pertama, yang terkait secara makro dulu, apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, Pak Pimpinan Rapat dan Bapak-Ibu yang lain terkait dengan berbagai permasalahan pemanfaatan dana desa, pengawasan, dan lain-lain, betul yang disampaikan oleh Pak Hamka. Itu kuncinya satu, revisi terhadap regulasi. Karena hari ini Kementerian Desa sendiri tidak punya kewenangan sampai pada memberikan sanksi atas segala temuan yang terkait dengan pemanfaatan dana desa, karena itu ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Bahkan masih ada regulasi yang sudah dianulir masih dipakai dan kita sudah sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM secara normatif, karena kita tidak ingin kemudian ada..., ada apa ya ada ketidakharmonisan antar K/L itu, jadi kita tidak membukain tapi karena ini forumnya forum DPR maka ini saya sampaikan dan kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa ada padahal itu akan berdampak cukup panjang *gitu*, termasuk akuntabilitas kinerja dan lain-lain. *Nah*, ini satu contoh kecil aja bahwa memang masih perlu penataan yang holistik terhadap regulasi tentang pembangunan desa.

Kalau rekomendasi kita sudah sangat banyak, misalnya ADD untuk honor. Ngapain kita sampaikan, kenapa *ndak* langsung aja masuk di dalam sistem dana desa meskipun tidak semua desa diberikan itu. misalnya rekomendasi kita ketika desa itu sudah mandiri dengan ukuran-ukuran tertentu, maka dana desa harus ditingkatkan dan kewenangannya juga ditambah. Karena kalau dana desa ditingkatkan, kewenangan tidak ditambah, ini *problem*.

Nah, misalnya ADD tadi honor kepala desa, honor perangkat desa, masukkan saja di dalam paket dana desa tapi khusus untuk desa mandiri yang sudah teruji yang ada keterlibatan masyarakatnya lebih maksimal dan seterusnya sehingga langsung dari APBN ke desa seperti yang berlaku sekarang tapi mereka kelola sendiri karena kewenangannya ditambahin.

Bahkan hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan, misalnya terkait jaring pengaman sosial, bantuan pangan non tunai, kenapa *sih* kita diserahkan ke desa saja sehingga belanja barangnya juga dialokasi di desa itu dan ini pasti akan meningkatkan ekonomi, tidak harus kemudian di-*drop* dari Jakarta berasnya misalnya bantuan pangan non tunai, tidak harus di-*drop* dari provinsi, bisa dibelanjakan di lokasi dengan kriteria tertentu, tapi ini memang butuh pengawasan dan butuh proses, tidak bisa serta-merta makanya ada tahapan-tahapan yang kita sampaikan juga di dalam rekomendasi.

Jadi di dalam mengakhiri keberadaan saya di Kementerian Desa yang tinggal beberapa bulan ini, kita memang mengeluarkan beberapa rekomendasi yang kita sampaikan kepada semua pihak yang nanti juga akan kita sampaikan kepada DPR supaya ke depan betul-betul ada totalitas di dalam penanganan desa dan posisi desa betul-betul menjadi ujung tombak.

Jadi, itu secara umum komentar kami terhadap apa yang disampaikan Bapak-Ibu sekalian dan memang betul itu permasalahan-permasalahan di desa masih banyak yang terkait dengan kewenangan dengan pemanfaatan dana, dengan sinergitas antar kelembagaan dan semua kelembagaan kementerian dan lembaga itu rata-rata kepingin memanfaatkan dana desa juga, tapi karena memang dibatasi oleh kewenangan akhirnya kita bisa sampaikan bahwa itu *ndak* mungkin karena itu di luar kewenangan desa, karena itu kewenangan supra desa.

Misalnya ada keinginan bagaimana dan desa bisa *enggak* untuk bangun SD, ya *enggak* bisalah karena itu kewenangan supra desa bukan kewenangan desa, karena SD di wilayah itu sangat rusak atau renovasi dan seterusnya, jadi semua ngelirik dana desa. Jadi memang betul kasihan kepala desa itu, dan ada kasus juga yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara terbuka nanti akan saya sampaikan secara tutup kalau memang dikehendaki terkait dengan betapa tekanan-tekanan terhadap kepala desa itu luar biasa banyaknya.

Oleh karena itulah, kita terus berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung supaya betul-betul ada sebuah pendekatan yang bijak terhadap pembangunan di desa terkait dengan posisi kepala desa.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya yang terkait dengan penyerapan *Insyallah* dengan laporan dari masing-masing UG-1 saya sangat optimis bahwa, prognosis 98,89% itu bisa kita wujudkan. Karena semua sekarang sudah berjalan, misalnya di PEID itu memang masih kecil karena hampir anggaran di PEID itu sekarang fokus di Indonesia Timur dan ada *top up* memang 93 Miliar dan *top up*-nya akhir

sehingga pembagiannya menjadi besar tapi sudah kita proyeksikan semua program hari ini di Indonesia Timur di Papua, di NTT, di Maluku, itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena memang kita betul-betul fokus di sana dan ini sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Kemudian yang terkait dengan desa wisata, memang hari ini sangat menjadi idola, meskipun harus hati-hati supaya tidak kemudian terjadi kompetisi yang tidak sehat antar desa satu, supaya tidak kemudian terjadi titik jenuh maka saya selalu menyarankan dan menghimbau bahkan agak menekankan agar desa wisata itu tidak berbasis fabrikasi tapi berbasis alam. Karena kalau berbasis fabrikasi pasti cepat jenuh, tapi kalau berbasis alam itu pasti akan berkesinambungan.

Saya sederhana mencontohkannya Pantai Kuta di Bali, mungkin sejak nenek moyang ya seperti itu yang namanya Pantai Kuta tapi kenapa kemudian sampai hari ini *kok* banyak orang yang suka karena alam, jadi alam itu *enggak* akan pernah ada jenuhnya.

Yang kedua, kita sudah harus berpikir tentang kawasan pedesaan terkait dengan desa wisata supaya tidak timbul kecemburuan. Karena kalau di satu desa, ada desa wisata bagus pasti ini berdampak, berdampak kepada desa tetangga apa transportasinya, jalan yang lintas jalan yang melewati desa lain dan seterusnya. *Nah*, ini sudah kita antisipasi, kita kerja samakan supaya keuntungan-keuntungan yang diraih oleh desa yang punya wisata desa itu kemudian juga bisa dirasakan oleh desa tetangga yang tidak punya wisata, tapi dia terlewati oleh akses masuk ke desa wisata itu supaya ke depan juga tidak ada permasalahan yang tidak diharapkan.

Kemudian terkait dengan PHLN dan seterusnya nanti akan kita sampaikan rinciannya, juga termasuk prosentase capaian yang masih sedikit nanti akan kita laporkan detail secara tertulis karena itu akan apa akan sangat detail.

Dan terakhir terkait dengan belanja barang bukan belanja gaji, Pak Eddy Santana, sama saya juga *enggak* paham, tapi karena memang itu ketentuannya ya sudah mau *enggak* mau kita taruh di situ. Jadi aturan di Kementerian Keuangan *ndak* tahu itu nanti kita jelaskan secara tertulis dasarnya kenapa ada di, nomenklaturnya pokok, pokok belanja barang, *gitu loh*. Ini pertanyaan yang tiap tahun saya tanyakan juga ini *kok* belanja barang kenapa *enggak-enggak* masuk kelompok gaji. Iya orangnya dikasih belanja barang, mungkin tujuannya untuk dikasih supaya bisa belanja barang, mungkin *gitu*.

Yang terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Djenri. Jadi kita tidak pernah ada pengarahan terhadap pendamping, sama sekali tidak ada. Jadi, kalau *toh* itu ada pasti itu sifatnya lokal dan itu bagian dari yang kita awasi. Kalau saya membayangkan tadi yang disampaikan Pak Djenri ya mungkin tidak jauh-jauh dengan apa yang kita dengar hari ini misalnya di

Sorong, misalnya di Majalengka ada bupati yang begini-begini saya kira *enggak* ada kebijakan dari pusat, pasti itu karena kearifan lokal, karena mungkin mau cari apa cari apa, saya kira itu bagian dari dinamika dan oleh karena itu pasti nanti akan kita peringatkan supaya tidak mengambil posisi yang seperti itu.

Dan yang paling akhir terkait dengan rekrutmen pendamping desa, mekanismenya nanti akan kita laporkan secara tertulis karena ada tahapan, ada regulasi, ada referensi, tidak kemudian tanpa ada payung hukumnya. Jadi ada payung hukumnya supaya nanti lengkap nanti akan kita sampaikan secara tertulis.

Sedangkan untuk Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi V, selalu kami persilakan, Pak, selalu kami persilakan tapi mohon dengan sangat ketentuannya diikuti. Jadi beberapa, beberapa hal yang telah lewat saya dilapor ini begini-begini, ya janganlah kalau itu memang melanggar, nanti kalau beliau *enggak* terima ya nanti saya akan menghadap karena kita *enggak* mungkin kalau apa memaksakan itu bahaya nanti berdampak bukan hanya ke kita tapi kepada Bapak-Bapak juga akan berdampak.

Jadi, pasti kita tidak membatasi berapapun karena formasinya ada aturannya misalnya untuk PLD itu harus di desa, di kecamatan, iya di desa di kecamatan. Jadi misalnya PLD di desa ini, kabupaten apa kecamatan? kabupaten. Jadi misalnya desa A ini yang kosong formasinya maka dia harus dari kabupaten itu, tidak boleh dari kabupaten lain karena akan jadi masalah dari sisi apa transportasi dan lain-lain. *Nah*, itu..., itu..., itu salah satu kriteria yang memang untuk PLD harus kita kita penuhi.

Saya kira gitu, Pak Pimpinan dan Pak Anggota Komisi V yang saya hormati.

Terima kasih, mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Menteri penjelasannya.

Pak An'im, An'im mau ada masukan juga? Silakan, Pak. Maaf Pak Menteri ya walaupun sudah selesai, kasihan dia baru datang dari kampanye mungkin dia. Silakan, Pak An'im.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Menteri,

Pertama-tama saya ingin mendapat penjelasan mengapa realisasi anggaran Kemendes ini untuk 2023

KETUA RAPAT:

Itu sudah-sudah.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Sudah ya.

KETUA RAPAT:

Sudah terjawab tadi, Pak, yang lain saja yang belum terjawab tadi silakan.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Ya, singkat saja, Pak, saran ini, Pak. Saya juga mengharapkan agar dalam melaksanakan program dan anggaran baik pada, pada anggaran 2023 maupun pada Tahun Anggaran 2024 ya, Kemendes hendaknya bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting karena program-program yang dilaksanakan oleh Kemendes beririsan dengan program di kementerian dan lembaga lain.

Sebagai contoh, penanganan *stunting* di desa program ini beririsan dengan program di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Saya kira itu aja, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut, Pak, langsung Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih.

Hampir pasti semua program di desa itu ada irisannya termasuk *stunting* misalnya, ini malah kadang-kadang mau dibebankan sepenuhnya ke dana desa, ini yang kita keberatan. Misalnya dalam rapat pernah ada permintaan *stunting* itu dikasih prosentase, saya bilang *wah*, janganlah kalau prosentase,

kasihan, wong data *stunting* aja kita juga masih sangat *debatable*, tiap-tiap desa jumlahnya sangat berbeda-beda, *lah* kalau dikasih prosentase nanti mereka dipaksa untuk sementara tidak terlalu membutuhkan, di tempat lain sangat membutuhkan, sehingga bisa saja 50% untuk *stunting* karena memang sudah parah *stunting*-nya bisa saja, sehingga kalau diprosentase malah nanti membatasi dan ini sudah berkali-kali menjadi aspirasi kepala desa *mbok* jangan diprosentase.

Nah, itu..., itu salah satu apa kondisi objektif yang memang hampir semua program memang ujung pembangunan di desa sehingga hampir semua program itu ada irisannya dengan desa dan selalu diharapkan dari dana desa namun kita terus bisa memahamkan kepada K/L agar tidak serta-merta me..., apa memaksakan agar dana desa dimanfaatkan untuk itu. Silakan atas kewenangan yang dimiliki desa dan berikan kebebasan kepada desa untuk mengakomodir kalau memang itu dianggap penting oleh desa.

Saya kira demikian.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pak Menteri, saya ingin sekali mendengarkan *statement* Pak Menteri ini mengenai apa yang saya sampaikan tadi apakah sudah disampaikan oleh kawan-kawan ini, janji-janji politik ini. Sama halnya, Pak, di dalam penyusunan anggaran Republik Indonesia kita dalam membahas anggaran tahun 2024 kemarin, fokusnya menyelesaikan janji politik Pak Jokowi, itu lantang disampaikan itu di dalam rapat anggaran, Pak.

Nah, oleh karena itu, saya ingin memastikan juga apakah Kementerian Desa ini komit di dalam merealisasikan apa yang menjadi janji politik dan usulan kami tahun 2024, itu yang saya ingin dengarkan. Apakah itu yang desa wisata, BUMDes, dan sebagainya, dan sebagainya, pasar desa, dan seterusnya semua usulan kami mohon dipertimbangkan untuk bisa direalisasikan pada tahun 2024. Ini saya mau dengarkan Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih, Pak Hamka.

Menurut saya selama ini kita *enggak* pernah *enggak* komit. Jadi saya pastikan Kementerian Desa akan komit dengan apa yang menjadi kesepakatan dengan Komisi V meskipun ya meskipun 2024, karena di 2024, kita masih ketemu dua kali lagi, Pak, jadi *enggak* mungkin berani kita tidak komit. Saya kira itu komitmennya.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih Pak Menteri.

Ya, terjawab ya, sekarang kita langsung ke draf kesimpulan. Tolong draf kesimpulannya ya.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

28 NOVEMBER 2023, HARI SELASA.

1. Komisi V DPR memahami penjelasan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 di mana capaian per 31 Oktober 2023 sebagai berikut: realisasi keuangan 67,17%, sementara realisasi fisik adalah 73,61%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar mengambil upaya strategis untuk mempercepat penyerapan dalam mencapai progres *eh* prognosis anggaran Tahun Anggaran 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran di Tahun Anggaran 2024.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pemanfaatan dana desa, pengembangan wisata desa, serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri.
Bagaimana Anggota yang terhormat setuju? Pemerintah setuju?

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau setuju kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara Raker pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih.

**Bapak-Ibu sekalian,
Para Pimpinan, dan
Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Terima kasih atas segala saran dan pertimbangan yang sangat bagus tadi dan semua sudah kita catat. Mudah-mudahan ke depan pengelolaan terhadap pembangunan desa menjadi jauh lebih bagus setelah kita berusaha mengimplementasikan apa yang menjadi saran, masukan dan pertimbangan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, keberkahan dalam perjuangan untuk membangun Indonesia.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ya, saya pun atas nama Komisi V dan unsur Pimpinan serta Anggota mohon maaf kalau ada hal-hal yang terjadi dan kurang berkenan di hadapan Pak Menteri dan Anggota yang terhormat.

Oleh karena itu, rapat kita tutup dengan ucapan,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.43 WIB)

JAKARTA, 28 November 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002